

## BAB V

### KESIMPULAN DAN IMPLIKASI

#### A. Kesimpulan

Berdasarkan rumusan dan hasil penelitian yang dilakukan maka dapat disimpulkan bahwa penerapan penetapan tujuan tata kelola pemerintahan yang efektif dan kolaboratif di Kabupaten Banyumas masih belum sepenuhnya baik. Hal ini dapat dilihat dari adanya beberapa aspek yang belum optimal. Berikut merupakan rincian dari kebijakan tersebut :

#### 1. Aspek Kepatuhan Terhadap Peraturan Peraturan BPKP No 5 Tahun 2021

##### a. Kesesuaian sasaran strategis dengan peraturan BPKP No 5 tahun 2021

Pemerintah Kabupaten Banyumas telah berhasil menyusun sasaran strategis tata kelola pemerintahan yang efektif yang beorientasi hasil, relevan dan sesuai dengan mandat pemerintah daerah. Namun Indikator kinerja sasaran strategisnya belum memenuhi kriteria SMART-c (cukup) serta targetnya sudah dirancang dengan baik dilihat dari target dapat tercapai sebelum waktu yang ditentukan.

##### b. Kesesuaian strategi pencapaian sasaran strategis dengan Peraturan BPKP No 5 Tahun 2021

Strategi pencapaian sasaran strategis yang diterapkan sudah selaras dan sinergi dengan sasaran strategis di atasnya. Dalam hal indikator kinerja program dan kegiatan, ditemukan bahwa indikator kinerja yang digunakan belum memenuhi kriteria SMART-c(cukup) namun targetnya sudah baik. Artinya bahwa Strategi pencapaian sasaran strategis belum

sepenuhnya patuh terhadap Perban PKP No 5 Tahun 2021 karena indikator kinerjanya masih belum memenuhi kriteria SMART-c (cukup)

## 2. Aspek Lancarnya Rutinitas Fungsi

Proses koordinasi berjalan baik dengan melalui musrenbang, konsultasi publik,FGD serta Quick Of Meeting. Pendekatan bottom-up melalui musrenbang dan konsultasi publik menunjukkan integrasi yang baik dalam perencanaan

Adapun hambatan yang dihadapi ketika menetapkan tujuan tata kelola pemerintahan yang efektif dan kolaboratif adalah perbedaan persepsi antara individu atau pihak-pihak yang terlibat menjadi tantangan utama dalam penyusunan sasaran strategis dan strategi pencapaiannya. Hal ini memerlukan penyesuaian lebih lanjut.

Dan upaya yang dilakukan untuk menangani kendala yang dihadapi Oleh SDM melalui Bimtek, In-House Training, dan pendampingan menjadi solusi efektif untuk mengatasi kendala. Langkah-langkah ini menunjukkan komitmen Pemkab Banyumas dalam memperkuat kompetensi teknis perencana.

## B. Implikasi

### 1. Kepatuhan

#### a. Kesesuaian Sasaran Strategis dengan Peraturan BPKP No 5 Tahun 2021

Sasaran strategis yang ditetapkan berorientasi pada hasil, relevan, dan mampu menggambarkan mandat pemerintah daerah menunjukkan perencanaan yang terarah dan sesuai dengan tujuan pembangunan daerah.

Target yang ditetapkan juga sudah menunjukkan hasil yang baik, karena dapat dicapai sebelum periode waktu yang ditentukan. Hal ini menjadi capaian positif yang patut dipertahankan dengan memastikan proses perencanaan tetap konsisten menggunakan pendekatan berbasis data dan mempertimbangkan kondisi aktual di lapangan. Namun, indikator kinerjanya yang masih belum sepenuhnya memenuhi kriteria SMART-c (cukup). Untuk itu, disarankan agar pemerintah daerah menambah indikator kinerja tambahan ke dalam Perjanjian Kinerja(PK) Bupati . Penambahan ini bertujuan untuk lebih menggambarkan pencapaian sasaran secara komprehensif, memastikan indikator lebih spesifik, terukur, dan relevan, serta memberikan tantangan yang mendorong peningkatan kinerja secara berkelanjutan.

b. Kesesuaian strategi pencapaian sasaran strategis dengan Peraturan BPKP No 5 Tahun 2021

Strategi pencapaian yang telah selaras dan sinergi dengan sasaran strategis di atasnya menunjukkan bahwa perencanaan telah dirancang secara terintegrasi dan terarah. Hal ini perlu dipertahankan dengan memastikan koordinasi lintas sektor tetap berjalan optimal, evaluasi berkala dilakukan untuk menjaga relevansi strategi, dan penyesuaian kebijakan dilaksanakan sesuai dengan dinamika kebutuhan daerah. Dengan demikian, tata kelola pemerintahan yang efektif dan kolaboratif dapat terus diwujudkan secara berkelanjutan.

Namun masih terdapat kelemahan pada indikator kinerja program dan kegiatan, kelemahan yang ditemukan karena belum sepenuhnya memenuhi kriteria SMART sehingga perlu ada revisi dan penambahan indikator yang lebih relevan dan terukur di dalam dokumen Perjanjian Kinerja (PK). Penyesuaian ini bertujuan agar indikator dapat lebih menggambarkan capaian kinerja secara akurat dan relevan dengan tujuan yang diharapkan.

Sementara itu, untuk target strategi pencapaian sasaran strategis yang telah tercapai, diperlukan proses retargeting atau penyesuaian ulang target. Hal ini dilakukan agar target yang baru dapat lebih realistis, sesuai dengan kondisi dan potensi perkembangan ke depan.

## 2. Aspek Lancarnya Rutinitas Fungsi

Proses Koordinasi penetapan tujuan tata kelola pemerintahan yang efektif dan kolaboratif sudah menunjukkan hal baik namun pentingnya untuk terus melakukan pembaruan dan penyesuaian materi pelatihan sesuai dengan perkembangan kebutuhan di lapangan, serta memastikan partisipasi aktif dari semua pihak terkait dalam proses peningkatan kapasitas. Oleh karena itu, disarankan agar Pemkab Banyumas melanjutkan dan memperluas upaya pelatihan ini, tidak hanya untuk meningkatkan kompetensi teknis, tetapi juga untuk meningkatkan pemahaman mengenai visi dan sasaran strategis yang lebih jelas di semua tingkatan pemerintahan. Serta melakukan studi tiru dengan wilayah yang sudah berhasil menetapkan penetapan tujuan dengan baik